

# LAPORAN SURVEY PERSEPSI KORUPSI 2022 (TRIWULAN IV)

PENGADILAN  
AGAMA  
SUMENEP

JL. Trunojoyo Km. 3 no. 300, Sumenep  
Telp. (0328) 662453

Email : pasumenep@gmail.com



# **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, kami dapat menyelesaikan Laporan Indeks Persepsi Korupsi Triwulan IV Tahun 2022. Pembuatan Laporan ini merupakan bentuk respon dari Pengadilan Agama Sumenep dalam Peningkatan Layanan Publik untuk mengukur tingkat kepercayaan masyarakat kepada Aparatur Pengadilan Agama Sumenep dalam penyelenggaraan tugas sehari-hari.

Pelaksanaan Survey ini juga merupakan komitmen dari Pimpinan Pengadilan Agama Sumenep dalam rangka pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan survey ini masih banyak kekurangan sehingga perlu perbaikan ke depannya agar lebih baik. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa kami harapkan.

Laporan Indeks Persepsi Korupsi ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak yang memerlukan data ini, khususnya bagi internal Pengadilan Agama Sumenep untuk digunakan sebagai bahan evaluasi dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sumenep, 30 Desember 2022

Ketua Pengadilan Agama Sumenep

Drs.H.Palatua, S.H.,M.H.I.

NIP. 196702171994031003

# DAFTAR ISI

## Hal

<b>KATA PENGANTAR</b>	ii
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>DAFTAR TABEL</b>	iv
<b>DAFTAR GRAFIK</b>	v
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	6
1.1. Latar Belakang	6
1.2. Maksud dan Tujuan	7
1.3. Dasar Hukum	7
1.4. Ruang Lingkup	8
<b>BAB II. METODOLOGI</b>	10
2.1. Metode Penelitian	10
2.2. Populasi dan Sampel	10
2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis	10
2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control	11
2.5. Teknik Analisis Data	11
2.6. Tahapan Pelaksanaan	11
<b>BAB III. PROFIL RESPONDEN</b>	14
3.1. Jenis Kelamin	14
3.2. Kelompok Umur	15
3.3. Pendidikan Terakhir	16
3.4. Pekerjaan Utama	17
<b>BAB IV. INDEKS PERSEPSI KORUPSI</b>	18
4.1. Indeks Persepsi Korupsi per indikator	18
4.2. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan	18
<b>BAB V. PENUTUP</b>	31
5.1. Kesimpulan	31
5.2. Rekomendasi	31
<b>LAMPIRAN</b>	32

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Nilai Persepsi	12
Tabel 2	Ruang lingkup survey Indeks Presepsi Korupsi	13
Tabel 3	Indeks pada indikator manipulasi peraturan	18
Tabel 4	Indeks pada penyalahgunaan jabatan	19
Tabel 5	Indeks pada indikator menjual pengaruh	20
Tabel 6	Indeks pada indikator transparansi biaya	22
Tabel 7	Indeks pada indikator tambahan biaya	23
Tabel 8	Indeks pada indikator hadiah	24
Tabel 9	Indeks pada indikator transparansi pembayaran	25
Tabel 10	Indeks pada indikator percaloan	26
Tabel 11	Indeks pada indikator perbuatan curang	27
Tabel 12	Indeks pada indikator transaksi rahasia	28
Tabel 13	Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Sumenep	29
Tabel 14	Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Sumenep	30

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Profil Responden berdasarkan jenis kelamin	14
Grafik 2	Profil Responden berdasarkan Umur	15
Grafik 3	Profil Responden berdasarkan Pendidikan	16
Grafik 4	Profil Responden berdasarkan Pekerjaan Utama	17
Grafik 5	Indeks pada penyalahgunaan jabatan	19
Grafik 6	Indeks pada penyalahgunaan jabatan	20
Grafik 7	Indeks pada indikator menjual pengaruh	21
Grafik 8	Indeks pada indikator transparansi biaya	22
Grafik 9	Indeks pada indikator indikator tambahan biaya	23
Grafik 10	Indeks pada indikator pada indikator hadiah	24
Grafik 11	Indeks pada indikator pada indikator hadiah	25
Grafik 12	Indeks pada indikator pada indikator percaloan	26
Grafik 13	Indikator perbuatan curang	27
Grafik 14	Indikator indikator transaksi rahasia	28
Grafik 15	Indikator indikator transaksi rahasia	30

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Agama Sumenep berkomitmen untuk terus menerus melakukan pengawasan, evaluasi dan perbaikan sesuai dengan agenda Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas.

Komitmen tersebut berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Agama Sumenep sebelumnya pada tahun 2022 triwulan IV juga telah melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat yang merupakan agenda rutin tahunan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan. Tidak cukup hanya survey kepuasan masyarakat,

Pengadilan Agama Sumenep juga ingin mengetahui persepsi masyarakat terhadap Integritas Penyelenggara Pelayanan Publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan hasil Survey Persepsi Korupsi dari masyarakat, Pengadilan Agama Sumenep akan memperoleh masukan yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan kebijakan dalam mencegah secara total terjadinya korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

## **1.2. Maksud Dan Tujuan**

Maksud dari Penyusunan Survey Persepsi Korupsi terhadap Pengadilan Agama Sumenep ini, dimaksudkan untuk mengetahui penilaian masyarakat mengenai integritas petugas layanan.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survey Persepsi Korupsi adalah untuk mendapat umpan balik yang dapat dijadikan pedoman dalam menyusun kebijakan menuju Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

## **1.3. Landasan Hukum**

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS).
- h) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat.
- i) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- j) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat.

#### **1.4. Ruang Lingkup dan Perencanaan Kegiatan**

Kegiatan Survey Persepsi Korupsi dilaksanakan pada Pengadilan Agama Sumenep dengan Perencanaan Kegiatan berupa:

##### **a) Persiapan**

Beberapa persiapan yang perlu diperhatikan sebelum melaksanakan survey persepsi korupsi adalah sebagai berikut:



1) Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan Sendiri, survey dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya

2) Penyiapan Bahan

- a. Kuesioner.
- b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
- c. Kelengkapan peralatan.

3) Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

- a. Jumlah Responden.
- b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.

4) Penyusunan Jadwal

Penyusunan rencana dan pelaksanaan survey dilakukan.

**b) Pelaksanaan Pengumpulan Data**

1) Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.

2) Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.

3) Pengujian kualitas dan validitas data.

4) Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

**c) Jadwal Survey**

Survey dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

## **BAB II**

### **METODE PENELITIAN**

#### **2.1. Metode Penelitian**

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

#### **2.2. Populasi Dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan Agama Sumenep dalam hal ini yang melakukan pengurusan Akta Cerai.

Jumlah minimal responden yang harus dipenuhi mengacu pada :

$$S = (\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q) / (d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q)$$

Ket :

S = Jumlah sampel

$\lambda^2$  = Lamda (faktor pengali) dengan dk = 1, taraf kesalahan bias 1%, 5%, 10%

N = Populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5 d = 0,0.

Sesuai dengan tabel Morgan dan Krechie

#### **2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis**

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian

terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini lokasi penelitian yaitu Kantor Pengadilan Agama Sumenep.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

#### **2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control**

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu enam bulan. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Ketua Tim ZI Pengadilan Agama Sumenep). Ketua Tim akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survey IPK.

#### **2.5. Teknik Analisis Data**

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Kuesioner yang diberikan kepada responden memiliki nilai skor 1 – 6, dengan skor 1 adalah nilai terendah dan 6 adalah nilai tertinggi, Kemudian skor tersebut dijumlahkan kemudian dikonversi ke dalam skala 1 – 4. Di mana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani, seperti yang tertera dalam **Tabel 1**.

Tabel 1.  
 Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

**Pertama**, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

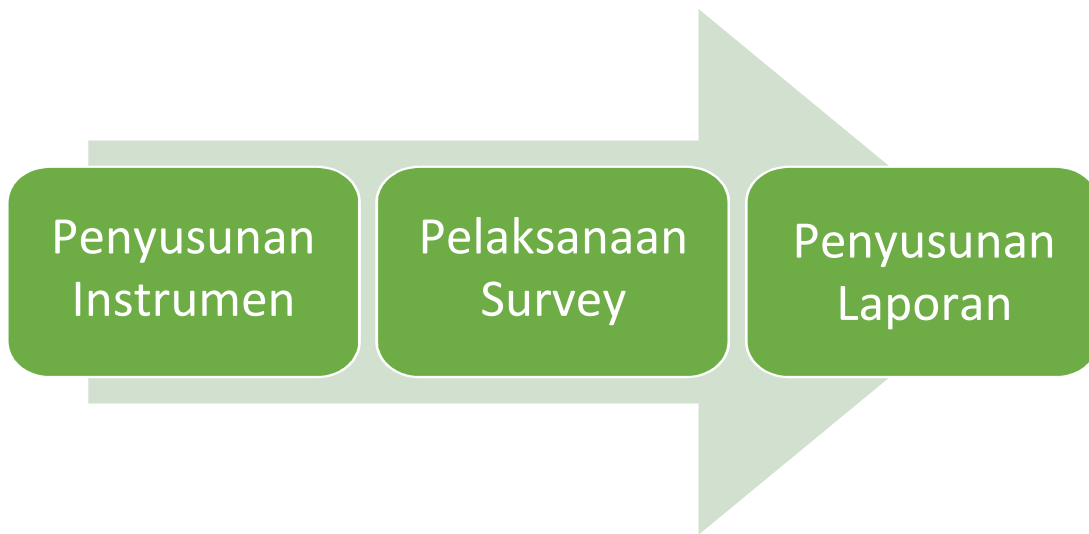
Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0 - 100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

## 2.6. Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survey lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survey persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini :

### MODEL ALUR PENYUSUNAN SURVEY IPK MENUJU ZONA INTEGRITAS



Tabel 2.  
Ruang lingkup survey Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang Lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

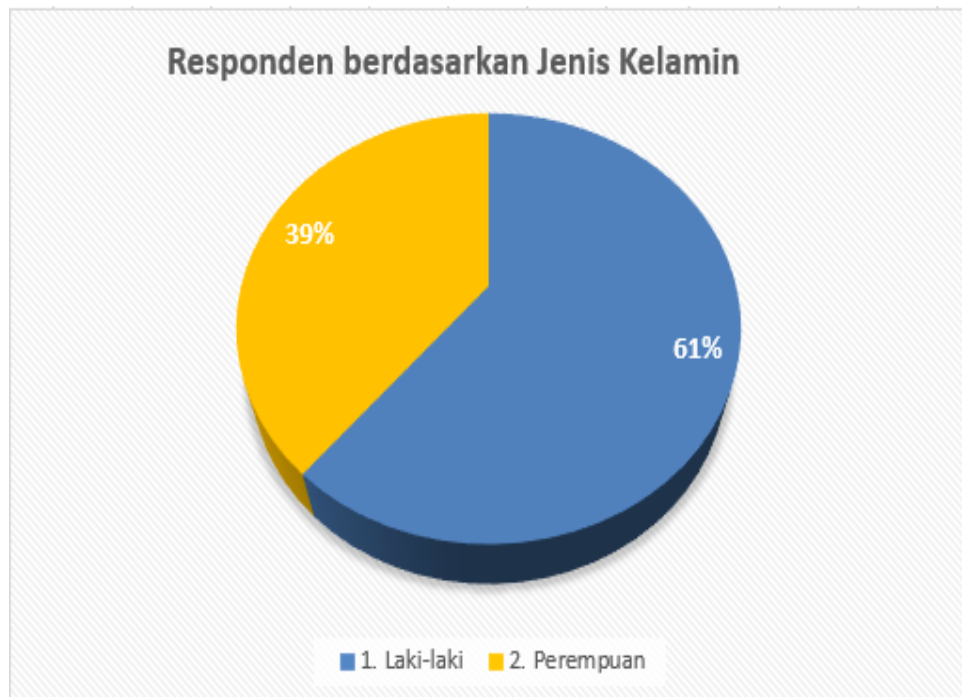
## BAB III

### PROFIL RESPONDEN

#### 3.1. Jenis Kelamin

Ditinjau dari sisi jenis kelamin, responden survey mayoritas adalah laki-laki. Seperti yang terlihat pada **Grafik 1**, sebanyak 61% responden adalah laki-laki, sedangkan 39% sisanya adalah perempuan.

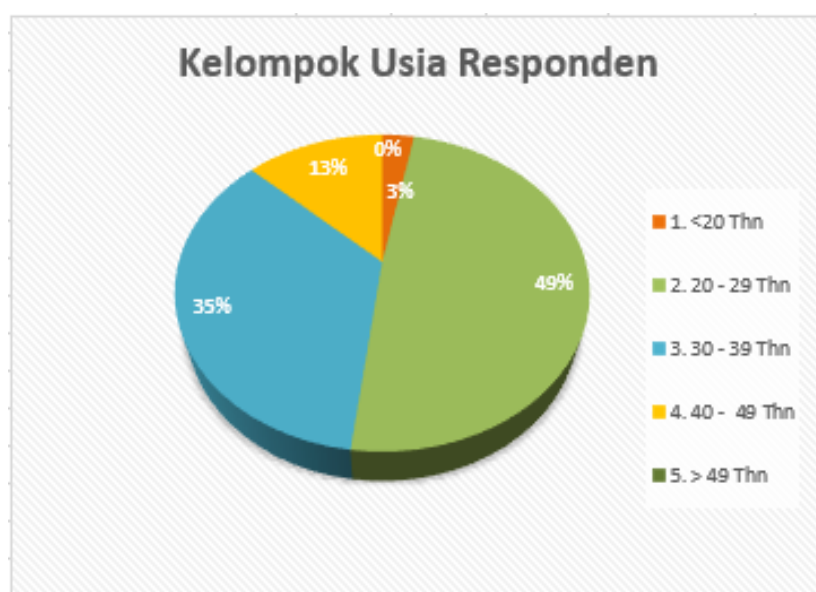
Grafik. 1. Profil Responden berdasarkan jenis kelamin



### 3.2 Kelompok Usia

Ditinjau dari Kelompok Usia, kelompok yang mendominasi adalah kelompok usia produktif yaitu usia 20-29 tahun. **Grafik 2** menunjukkan bahwa sebanyak 49% responden Survey Persepsi Korupsi Pengadilan Agama Sumenep adalah usia 20-29 Tahun, sebanyak 35% responden usia 30-39 tahun, sebanyak 13% responden adalah usia 40-49 Tahun, sebanyak 0% responden adalah usia di atas 49 tahun dan usia di bawah 20 tahun sebanyak 3%.

Grafik. 2. Profil Responden berdasarkan Umur



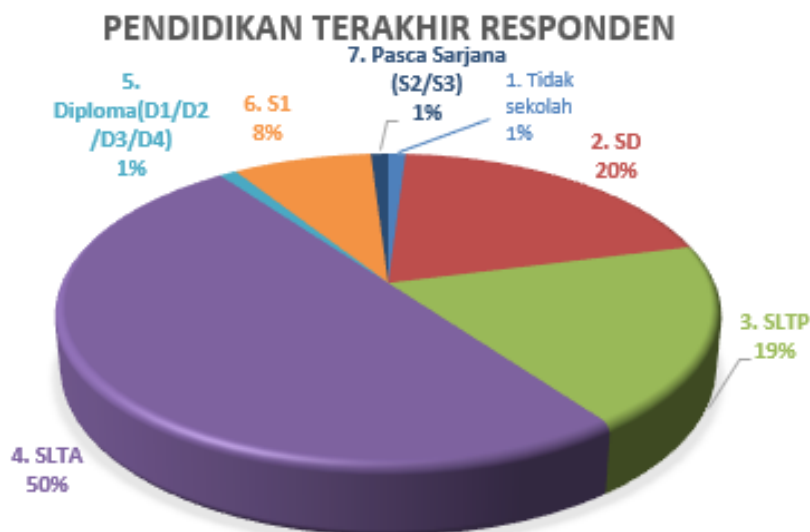
### 3.3 Pendidikan Terakhir

Tingkat pendidikan diyakini berkaitan dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kedewasaan yang dimiliki. Oleh karena itu, penting untuk melihat karakteristik responden menurut tingkat pendidikan. Dalam survey ini terdapat 7 kategori tingkat pendidikan, yaitu Tidak Sekolah, SD, SLTP, SLTA, Diploma, Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2/S3).

Pada data survey ini, responden terbanyak berasal dari jenjang SLTA sebesar 50%, kemudian dari jenjang SD sebesar 20%, SLTP

sebesar 19%, Sarjana (S1) sebesar 8%, Diploma sebesar 1%, Pasca Sarjana sebesar 1%, dan Tidak Sekolah 1% seperti yang disajikan dalam **Grafik3**.

Grafik. 3. Profil Responden berdasarkan Pendidikan



### 3.4 Pekerjaan Utama

Status dalam pekerjaan utama sangat berkaitan dengan tingkat pendapatan yang diperoleh. Responden dalam survey ini mayoritas berasal dari kelompok pekerjaan Lainnya (Buruh, Ibu rumah tangga, dll), seperti yang ditunjukkan dalam **Grafik 4**, dengan persentase sebesar 49%. Selanjutnya, 18% responden termasuk ke dalam kelompok pekerjaan Petani/Nelayan, 18% responden merupakan Wiraswasta, 10% responden merupakan Pedagang, 4% responden memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Swasta, 1% responden adalah PNS, dan Advokat sebesar 0%. Pada survey ini tidak ada responden yang bekerja sebagai TNI/POLRI.



Grafik. 4. Profil Responden berdasarkan Pekerjaan Utama



## **BAB IV**

### **INDEKS PERSEPSI KORUPSI**

#### **4.1 Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator**

##### **4.1.1. Manipulasi Peraturan**

Dari skor 1 (terendah) sampai 6 (tertinggi), hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil sangat baik. Setelah dikonversi ke Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diperoleh nilai indeks 3,98, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 3. Hal tersebut dapat diartikan kinerja Satuan Kerja Pengadilan Agama Sumenep Bebas dari Manipulasi Peraturan, artinya pelayanan sesuai prosedur dan ketentuan serta tidak dipersulit untuk maksud tertentu.

Tabel 3.

Indeks pada indikator manipulasi peraturan

Skor	Frekuensi
1	0
2	0
3	0
4	1
5	1
6	98
<b>Total Responden</b>	<b>100</b>
<b>Total Skor</b>	<b>99,50</b>
<b>Konversi Nilai IPK</b>	<b>3,98</b>

Berdasarkan Tabel 3, secara visual dapat disajikan dalam Grafik 5 berikut ini.

Grafik. 5. Indeks pada indikator manipulasi peraturan



#### 4.1.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skor 1 (terendah) sampai 6 (tertinggi), hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil sangat baik. Setelah dikonversi ke Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diperoleh nilai indeks 3,95 seperti pada Tabel 4. Indeks tersebut menunjukkan bahwa satuan kerja Pengadilan Agama Sumenep Tidak Ada Penyalahgunaan Jabatan, berarti petugas melayani secara cepat tanpa ada penawaran dengan meminta imbalan tertentu.

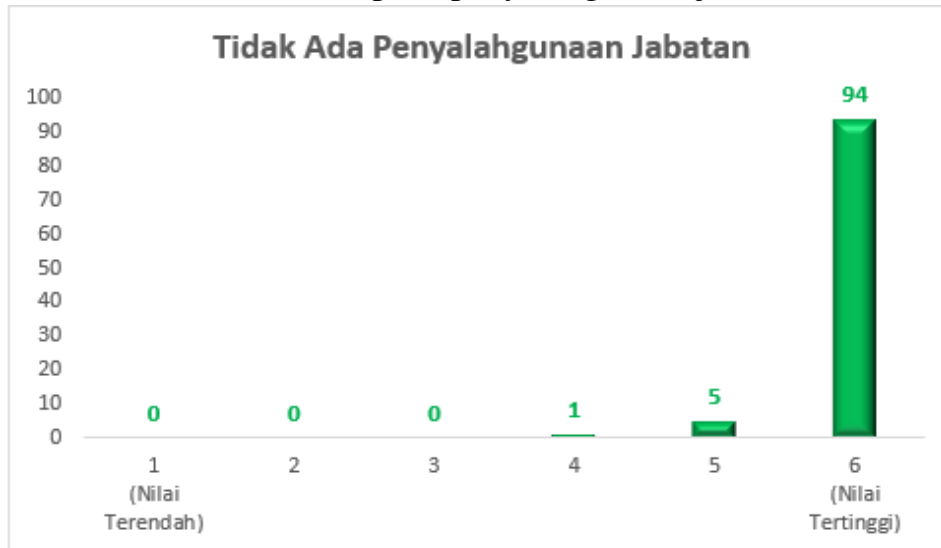
Tabel 4.

Indeks pada indikator penyalahgunaan jabatan

Skor	Frekuensi
1	0
2	0
3	0
4	1
5	5
6	94
<b>Total Responden</b>	<b>100</b>
<b>Total Skor</b>	<b>98,83</b>
<b>Konversi Nilai IPK</b>	<b>3,95</b>

Berdasarkan tabel tersebut, secara visual dapat disajikan dalam grafis seperti Grafik 6 berikut ini.

Grafik. 6. Indeks pada penyalahgunaan jabatan



#### 4.1.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skor 1 (terendah) sampai 6 (tertinggi), hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil sangat baik. Setelah dikonversi ke Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diperoleh nilai indeks 3,93 seperti pada Tabel 5. Indeks tersebut menunjukkan bahwa Satuan Kerja Pengadilan Agama Sumenep Tidak Pernah Menjual Pengaruh, yang berarti petugas tidak pernah menjanjikan pengurusan berkas perkara dengan imbalan tertentu.

Tabel 5.

Indeks pada indikator menjual pengaruh

Skor	Frekuensi
1	0
2	0
3	0
4	1
5	8
6	91
<b>Total Responden</b>	<b>100</b>
<b>Total Skor</b>	<b>98,33</b>
<b>Konversi Nilai IPK</b>	<b>3,93</b>

Berdasarkan Tabel 5, secara visual dapat disajikan dalam Grafik 7 berikut ini.

Grafik. 7. Indeks pada indikator menjual pengaruh



#### 4.1.4. Indikator Transaksi Biaya

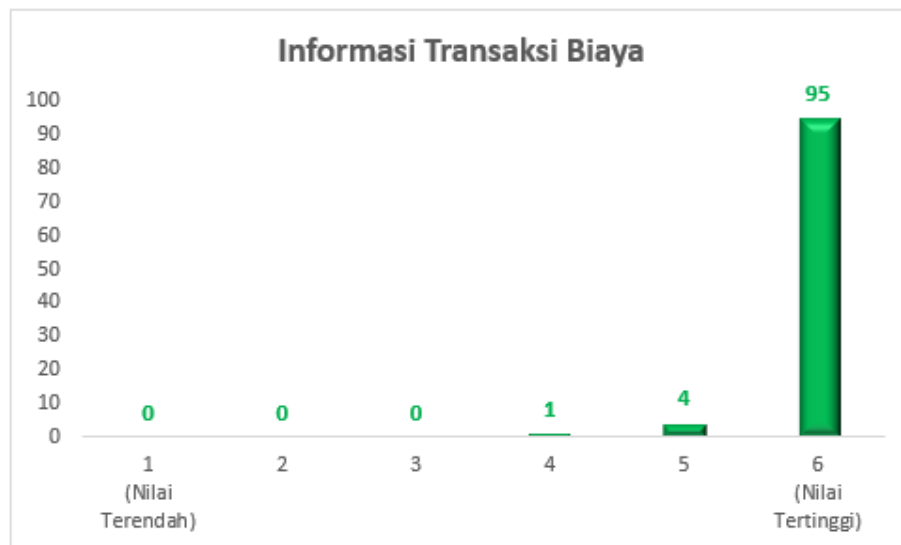
Dari skor 1 (terendah) sampai 6 (tertinggi), hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil sangat baik. Setelah dikonversi ke Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diperoleh nilai indeks 3,96 seperti yang tertera pada Tabel 6. Indeks tersebut menunjukkan bahwa Transaksi Biaya pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Sumenep sangat baik, berarti responden dapat mengakses informasi tarif/biaya dengan mudah.

Tabel 6.  
Indeks pada indikator transaksi biaya

Skor	Frekuensi
1	0
2	0
3	0
4	1
5	4
6	95
<b>Total Responden</b>	<b>100</b>
<b>Total Skor</b>	<b>99,00</b>
<b>Konversi Nilai IPK</b>	<b>3,96</b>

Berdasarkan Tabel 6, secara visual dapat disajikan dalam Grafik 8 berikut ini.

Grafik. 8. Indeks pada indikator transaksi biaya



#### 4.1.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skor 1 (terendah) sampai 6 (tertinggi), hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil sangat baik. Setelah dikonversi ke Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diperoleh nilai pada indeks 3,96. Indeks tersebut menunjukkan bahwa

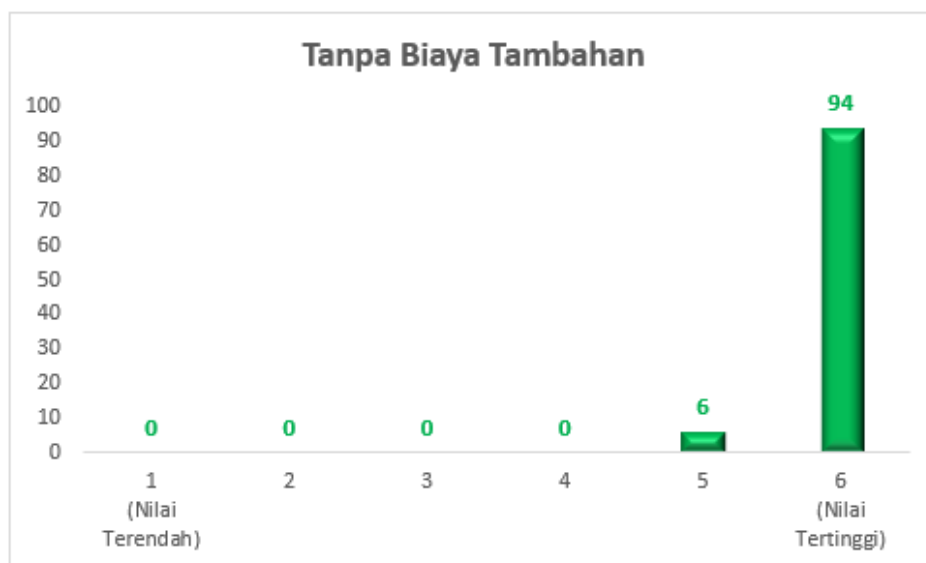
di Satuan Kerja Pengadilan Agama Sumenep Tidak Ada Biaya Tambahan, yang berarti pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa biaya tambahan di luar ketentuan yang berlaku.

Tabel 7.  
Indeks pada indikator tambahan biaya

Skor	Frekuensi
1	0
2	0
3	0
4	0
5	6
6	94
<b>Total Responden</b>	<b>100</b>
<b>Total Skor</b>	<b>99,00</b>
<b>Konversi Nilai IPK</b>	<b>3,96</b>

Berdasarkan Tabel 7, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Grafik. 9. Indeks pada indikator indikator tambahan biaya



#### 4.1.6. Indikator Hadiah

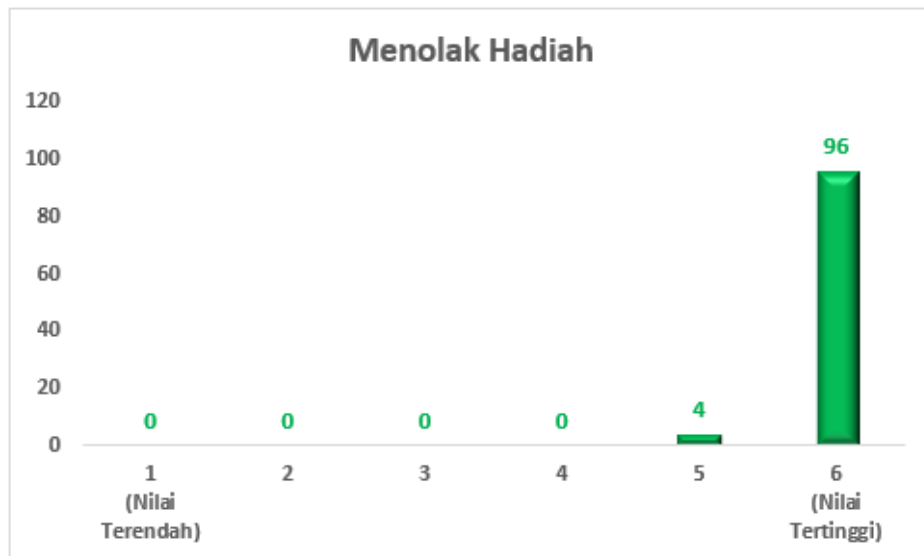
Dari skor 1 (terendah) sampai 6 (tertinggi), hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil sangat baik. Setelah dikonversi ke Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diperoleh nilai indeks 3,97 seperti yang tertera pada Tabel 8. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa petugas menolak hadiah/gratifikasi yang diberikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan/berperkara.

Tabel 8.  
Indeks pada indikator hadiah

Skor	Frekuensi
1	0
2	0
3	0
4	0
5	4
6	96
<b>Total Responden</b>	<b>100</b>
<b>Total Skor</b>	<b>99,33</b>
<b>Konversi Nilai IPK</b>	<b>3,97</b>

Berdasarkan Tabel 8, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Grafik. 10. Indeks pada indikator pada indikator hadiah





#### 4.1.7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skor 1 (terendah) sampai 6 (tertinggi), hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil sangat baik. Setelah dikonversi ke Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diperoleh nilai indeks 3,95 seperti yang tertera pada Tabel 9. Indeks tersebut menunjukkan bahwa petugas Satuan Kerja Pengadilan Agama Sumenep selalu memberikan bukti transaksi pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan.

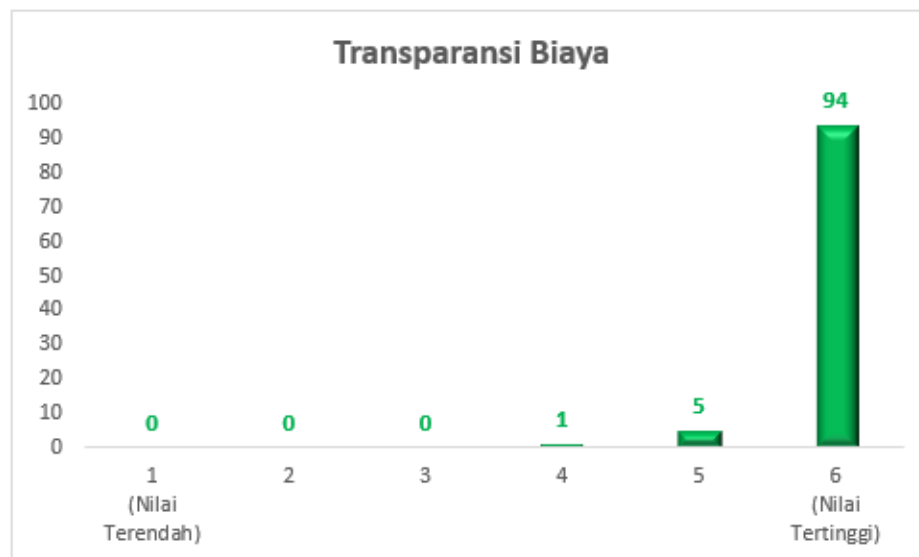
Tabel 9.

Indeks pada indikator transparansi pembayaran

Skor	Frekuensi
1	0
2	0
3	0
4	1
5	5
6	94
<b>Total Responden</b>	<b>100</b>
<b>Total Skor</b>	<b>98,83</b>
<b>Konversi Nilai IPK</b>	<b>3,95</b>

Berdasarkan Tabel 9, secara visual dapat disajikan dalam Grafik 11.

Grafik. 11. Indeks pada indikator pada indikator hadiah



#### 4.1.8.Indikator Percaloan

Dari skor 1 (terendah) sampai 6 (tertinggi), hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil sangat baik. Setelah dikonversi ke Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diperoleh indeks 3,93 seperti yang tertera pada Tabel 10. Indeks tersebut dapat diartikan Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Sumenep Bersih dari Pencaloan.

Tabel 10.

Indeks pada indikator Percaloan

Skor	Frekuensi
1	0
2	0
3	0
4	2
5	6
6	92
<b>Total Responden</b>	<b>100</b>
<b>Total Skor</b>	<b>98,33</b>
<b>Konversi Nilai IPK</b>	<b>3,93</b>

Berdasarkan Tabel 10, secara visual dapat disajikan dalam Grafik 12 berikut ini.

Grafik. 12. Indeks pada indikator percaloan



#### 4.1.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skor 1 (terendah) sampai 6 (tertinggi), hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil sangat baik. Setelah dikonversi ke Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diperoleh hasil indeks 3,94. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Sumenep Bersih dari Perbuatan Curang.

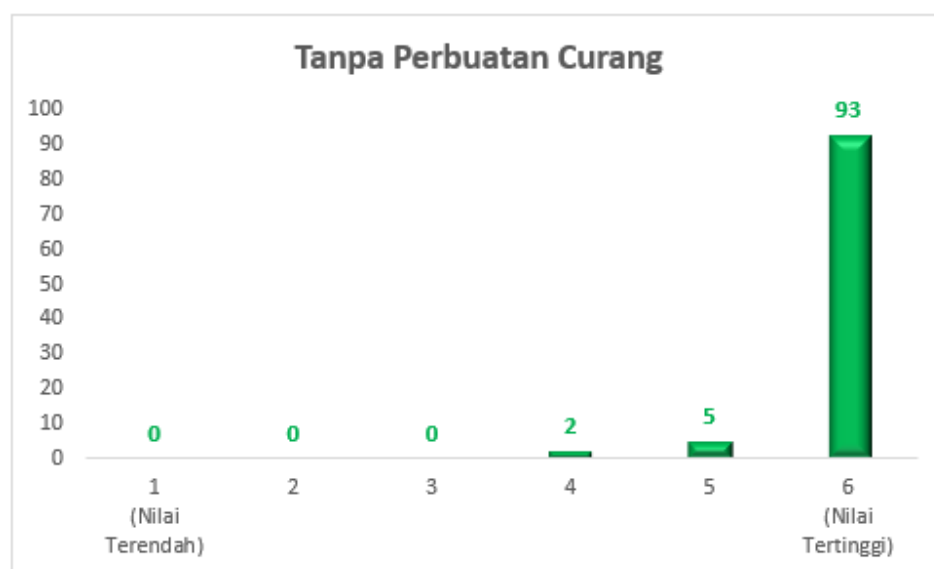
Tabel 11.

Indeks pada indikator perbuatan curang

Skor	Frekuensi
1	0
2	0
3	0
4	2
5	5
6	93
<b>Total Responden</b>	<b>100</b>
<b>Total Skor</b>	<b>98,50</b>
<b>Konversi Nilai IPK</b>	<b>3,94</b>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik 13 berikut ini.

Grafik. 13. Indeks pada indikator perbuatan curang



#### 4.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skor 1 (terendah) sampai 6 (tertinggi), hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil yang sangat baik. Setelah dikonversi ke Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diperoleh nilai indeks 3,96 seperti yang tertera pada Tabel 11. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Sumenep Bersih dari Transaksi Rahasia.

Tabel 12.

Tabel indeks pada indikator transaksi rahasia

Skor	Frekuensi
1	0
2	0
3	0
4	2
5	2
6	96
<b>Total Responden</b>	<b>100</b>
<b>Total Skor</b>	<b>99,00</b>
<b>Konversi Nilai IPK</b>	<b>3,96</b>

Berdasarkan Tabel 12, secara visual dapat disajikan dalam Grafik 14 berikut ini.

Grafik. 14. Indeks pada indikator Transaksi Rahasia



#### 4.2. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan

Berdasarkan 10 indikator tersebut, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Agama Sumenep sebesar 3,94.

Tabel 13.

Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Sumenep

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Kinerja
1	Manipulasi Peraturan	3,98	Bersih dari korupsi
2	Penyalahgunaan Jabatan	3,95	Bersih dari korupsi
3	Menjual Pengaruh	3,93	Bersih dari korupsi
4	Transaksi Biaya	3,96	Bersih dari korupsi
5	Biaya Tambahan	3,96	Bersih dari korupsi
6	Hadiah	3,97	Bersih dari korupsi
7	Transparansi Biaya	3,95	Bersih dari korupsi
8	Percaloan	3,93	Bersih dari korupsi
9	Perbuatan Curang	3,94	Bersih dari korupsi
10	Transaksi Rahasia	3,96	Bersih dari korupsi
<b>Rata-rata</b>		<b>3,95</b>	<b>Bersih dari korupsi</b>

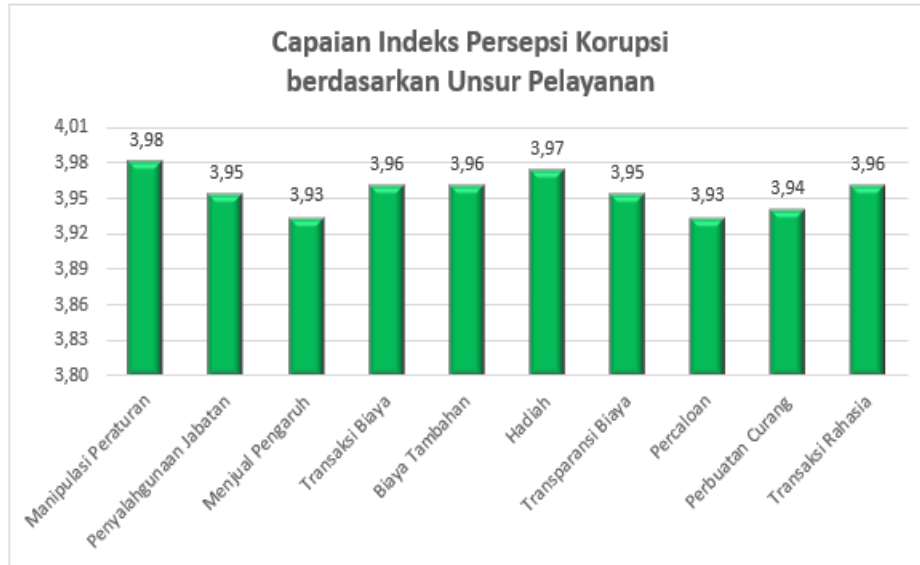
Indeks 3,95 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka **98,87**.

Tabel 14.

Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Sumenep

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1,00 - 1,75	25 - 43,75	1	Tidak Bersih dari Korupsi
2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	2	Kurang Bersih dari Korupsi
3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	3	Cukup Bersih dari Korupsi
4	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	4	Bersih dari Korupsi

Grafik 15. Capaian Indeks pada Masing-Masing Indikator



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Dari hasil survey Persepsi Korupsi tahun 2022 yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Agama Sumenep diperoleh bahwa Pengadilan Agama Sumenep memiliki Indeks Persepsi Korupsi 3,95 atau nilai interval konversi 98,87 dan masuk pada kategori **Bebas dari Korupsi**. Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks **3,98**
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks **3,95**
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks **3,93**
4. Indikator Transaksi Biaya mendapat indeks **3,96**
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks **3,96**
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks **3,97**
7. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks **3,95**
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks **3,93**
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks **3,94**
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks **3,96**

#### **4.2. Rekomendasi**

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator tersebut di atas, menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Sumenep termasuk pada persepsi **Bebas dari Korupsi**, dengan sebanyak 10 (sepuluh) indikator memiliki indeks di atas 3,90.

# LAMPIRAN



**Lampiran 1. Customer List Survey IPK Triwulan IV Tahun 2022**

## **CUSTOMER LIST**

(LAYANAN PENGADILAN AGAMA SUMENEP)

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan	No. HP	Output Layanan
1	Feri Fadli	27	Laki-laki	SLTA	089676100578	Akta Cerai
2	Feriyanto	22	Laki-laki	SD	087763905783	Akta Cerai
3	M.Hanafi	30	Laki-laki	SLTA	087741116208	Akta Cerai
4	Antono	30	Laki-laki	SMP	083833703767	Akta Cerai
5	Roqim	24	Laki-laki	SLTA	082244410323	Akta Cerai
6	Moh. Nurul Hidayat	22	Laki-laki	SD	081358367074	Akta Cerai
7	Zumailah	21	Perempuan	SLTA	087781312968	Akta Cerai
8	Moh.Rasuka	23	Laki-laki	SLTA	082139735396	Akta Cerai
9	Fikri Mulyadi	27	Laki-laki	SLTA	081914759593	Akta Cerai
10	Haini	22	Perempuan	SMP	085974815116	Akta Cerai
11	Luthfi	36	Laki-laki	SLTA	085903631191	Akta Cerai
12	Faizil Aqfa	29	Laki-laki	Sarjana (S1)	087837851836	Akta Cerai
13	Fitriya Ningsih	26	Perempuan	SLTA	085960175023	Akta Cerai
14	Faruqi	25	Laki-laki	SLTA	085959103054	Akta Cerai
15	Ismatul Uslah	23	Perempuan	SLTA	083189923728	Akta Cerai
16	Sayyadi	43	Laki-laki	SD	085336050500	Akta Cerai
17	Agus Salam	47	Laki-laki	SD	087777767861	Akta Cerai
18	Atiratun Nufus	20	Perempuan	SLTA	085331368915	Akta Cerai
19	Sutoyo	27	Laki-laki	SLTA	082335671213	Akta Cerai
20	Rika	26	Perempuan	SLTA	087751763344	Akta Cerai

21	Ibrahim	36	Laki-laki	SLTA	082332944800	Akta Cerai
22	Ifadah	33	Perempuan	SMP	085971161968	Akta Cerai
23	Muzanni	45	Laki-laki	SLTA	0853305421	Akta Cerai
24	Dedy Kurniadi	49	Laki-laki	SD	085231773233	Akta Cerai
25	Rudy Santoso	27	Laki-laki	SLTA	082330461846	Akta Cerai
26	Sriyana	29	Perempuan	SLTA	087778587294	Akta Cerai
27	Desy Dahlia	27	Perempuan	SMP	081918430804	Akta Cerai
28	Muyassaroh	22	Perempuan	SLTA	087722881855	Akta Cerai
29	Busairi	36	Laki-laki	SLTA	087866144255	Akta Cerai
30	Busri	33	Laki-laki	SD	087788834411	Akta Cerai
31	Abu Sairi	37	Laki-laki	SMP	082336166466	Akta Cerai
32	Syarifah	44	Perempuan	SMP	081230180038	Akta Cerai
33	Nur Hamimah	30	Perempuan	SMP	087777195449	Akta Cerai
34	Halimatussa'diyah	33	Perempuan	Sarjana (S1)	085330203092	Akta Cerai
35	Moh. Luthfi	27	Laki-laki	SMP	087767943866	Akta Cerai
36	Munzilatun Nikmah	18	Perempuan	SMP	087759817662	Akta Cerai
37	Abu Sairi	40	Laki-laki	SD	087750068407	Akta Cerai
38	Tri Afrizal Hakiki	27	Laki-laki	SLTA	085940700789	Akta Cerai
39	Hayani	39	Perempuan	SD	082337677020	Akta Cerai
40	Hj. Devi Cristina	48	Perempuan	Pasca Sarjana	085235357777	Akta Cerai
41	Ita Yulistia	32	Perempuan	Diploma	087859992928	Akta Cerai
42	Fairuzy	30	Laki-laki	SLTA	081934678466	Akta Cerai
43	Novi Indayana	32	Perempuan	SD	087723291482	Akta Cerai
44	Nurul Qomariyah	30	Perempuan	Sarjana (S1)	082335972209	Akta Cerai
45	Moh Taufik	46	Laki-laki	SLTA	087866218632	Akta Cerai
46	Ainur Rohmatin	27	Perempuan	Sarjana (S1)	081999226941	Akta Cerai
47	Takiyuddin	23	Laki-laki	SLTA	081807828125	Akta Cerai
48	Yumnawati	22	Perempuan	SD	085730918173	Akta Cerai

49	Moh.Syaiful Anwar	24	Laki-laki	SMP	081809881451	Akta Cerai
50	Paidatul Amniyah	32	Perempuan	SMP	087838053913	Akta Cerai
51	Fadli Rosadi	21	Laki-laki	SD	087815461091	Akta Cerai
52	Siti Suhartini	30	Perempuan	SLTA	081807116861	Akta Cerai
53	ST. Nurhasanah	26	Perempuan	SLTA	081909100846	Akta Cerai
54	Adriyah	22	Perempuan	SD	087771222849	Akta Cerai
55	Jemmi Faad, S.Pd.	42	Laki-laki	Sarjana (S1)	087850114632	Akta Cerai
56	Fathor	36	Laki-laki	SD	085232851772	Akta Cerai
57	Makrup Al Chatib	36	Laki-laki	SD	083159213689	Akta Cerai
58	Muhammad Imam	25	Laki-laki	SLTA	085691179729	Akta Cerai
59	Jalaluddin	31	Laki-laki	SLTA	087841934855	Akta Cerai
60	Imam Santoso	29	Laki-laki	SLTA	081779937799	Akta Cerai
61	Faisal Firdaus	24	Laki-laki	SLTA	081807824534	Akta Cerai
62	Zakariya	25	Laki-laki	SMP	081946777082	Akta Cerai
63	Su'udi	40	Laki-laki	SMP	085960144897	Akta Cerai
64	Rudianto	30	Laki-laki	SLTA	081939412500	Akta Cerai
65	Hevni Ady Putra	22	Laki-laki	SLTA	087800664203	Akta Cerai
66	Maisyarah	22	Perempuan	SLTA	087861999582	Akta Cerai
67	Supriyadi	44	Laki-laki	SLTA	087750022223	Akta Cerai
68	Ahmadi	28	Laki-laki	SMP	081717727124	Akta Cerai
69	Siti Fahimah	20	Perempuan	SMP	081908907048	Akta Cerai
70	Saiful Rizal	32	Laki-laki	SLTA	081935151214	Akta Cerai
71	Ma'mun	23	Laki-laki	SLTA	083813016143	Akta Cerai
72	Erika Tartila	21	Perempuan	SD	081808635628	Akta Cerai
73	Hamidi	27	Laki-laki	SLTA	081937747690	Akta Cerai
74	Hamdi	34	Laki-laki	SLTA	087789473128	Akta Cerai
75	Asari	21	Laki-laki	SLTA	087869162078	Akta Cerai
76	Aswari	24	Laki-laki	SLTA	085282670420	Akta Cerai

77	Khususiyah	21	Perempuan	SD	081933101979	Akta Cerai
78	Kamil	27	Laki-laki	Sarjana (S1)	087777725314	Akta Cerai
79	Ahmad Ariawan	26	Laki-laki	SD	082331485541	Akta Cerai
80	Dyan Arifianto, S.Sos	40	Laki-laki	Sarjana (S1)	081256381216	Akta Cerai
81	Moh.Kamil	24	Laki-laki	SLTA	087889329598	Akta Cerai
82	Helli	37	Laki-laki	SD	087785313752	Akta Cerai
83	Fitriyani	27	Perempuan	SMP	081807888536	Akta Cerai
84	Rusmiyati	32	Perempuan	SLTA	085732380365	Akta Cerai
85	Siti Rosyidah	19	Perempuan	SLTA	081913116120	Akta Cerai
86	Yulianang Mahmudi	35	Laki-laki	SD	085771900052	Akta Cerai
87	Subaidi	26	Laki-laki	SLTA	082333675010	Akta Cerai
88	Sirajum Munawarah	33	Perempuan	SLTA	081999472334	Akta Cerai
89	Susilowati	30	Perempuan	SLTA	087777382118	Akta Cerai
90	Tio Ranu Ansyah	22	Laki-laki	SLTA	087752834635	Akta Cerai
91	Rina Wulandari	35	Perempuan	SLTA	087877011457	Akta Cerai
92	Elwanto	34	Laki-laki	SLTA	087755383888	Akta Cerai
93	Anis Riskiyah	19	Perempuan	SMP	085975338037	Akta Cerai
94	Suryati	38	Perempuan	SMP	085856293249	Akta Cerai
95	Imam Rafi'e	31	Laki-laki	SLTA	087884052503	Akta Cerai
96	Adi Santoso	35	Laki-laki	SMP	085232036903	Akta Cerai
97	Saiful Badri	40	Laki-laki	Sarjana (S1)	081913095069	Akta Cerai
98	Satima	32	Perempuan	Tidak Sekolah	087765910019	Akta Cerai
99	Sitilistia ningsi	21	Perempuan	SLTA	081944110057	Akta Cerai
100	Moh . Fajar	35	Laki-laki	SD	082301210409	Akta Cerai